



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Haji dan Umrah RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 17 Juni 2026
Waktu	: Pukul 10.00 – 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2027 2. Isu-isu Aktual
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 20 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 1 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri dan Wakil Menteri Agama RI beserta Jajaran; 4. Menteri dan Wakil Menteri Sosial RI beserta Jajaran; 5. Menteri dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI beserta Jajaran; 6. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI beserta Jajaran; 7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta Jajaran; 8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI beserta Jajaran.

## I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Ansory Siregar, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Haji dan Umrah RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, dengan agenda **Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga Tahun 2027 dan Isu-isu Aktual**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Kementerian Agama RI dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kementerian Agama RI mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp87.660.525.101.000,- (*delapan puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Eselon 1	Pagu Indikatif TA 2027
1	Sekretariat Jenderal	46.376.656.463.000
2	Inspektorat Jenderal	97.891.210.000
3	Ditjen Bimas Islam	1.647.716.899.000
4	Ditjen Pendidikan Islam	37.691.672.166.000
5	Ditjen Bimas Kristen	806.890.966.000
6	Ditjen Bimas Katolik	240.913.070.000
7	Ditjen Bimas Hindu	318.906.280.000
8	Ditjen Bimas Buddha	129.647.049.000
9	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	350.230.998.000
<b>JUMLAH</b>		<b>87.660.525.101.000</b>

- b. Kementerian Agama RI mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp41.891.684.157.000,- (*empat puluh satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian:

No.	Unit Eselon 1	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
1	Sekretariat Jenderal	7.906.095.649.000
2	Inspektorat Jenderal	278.108.790.000
3	Ditjen Bimas Islam	1.360.007.347.000
4	Ditjen Pendidikan Islam	14.738.197.301.000
5	Ditjen Bimas Kristen	1.226.876.250.000
6	Ditjen Bimas Katolik	440.746.318.000
7	Ditjen Bimas Hindu	530.283.179.000
8	Ditjen Bimas Buddha	409.695.400.000
9	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM	1.015.861.923.000
No.	Program	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
1	Direktorat Jenderal Pesantren	4.500.000.000.000
2	Insentif guru Non ASN Non Sertifikasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan sebesar Rp 1.250.000,- / orang / bulan. (Guru Agama Kristen 10.997 orang, Guru Agama Katolik 1.100 orang, Guru Agama Hindu 3.942 orang, Guru Agama Buddha 3.000 orang, dan Guru Agama Khonghucu 178 orang)	295.812.000.000
3	Revitalisasi madrasah dan sekolah keagamaan berjumlah 4.750 lembaga	9.190.000.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>41.891.684.157.000</b>

2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Kementerian Sosial RI dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kementerian Sosial RI mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp84.707.704.302.000,- (*delapan puluh empat triliun tujuh ratus*

*tujuh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Eselon 1	Pagu Indikatif TA 2027
1	Sekretariat Jenderal	7.130.852.399.000
2	Inspektorat Jenderal	31.378.894.000
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	498.928.761.000
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.238.379.626.000
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	75.808.164.622.000
<b>JUMLAH</b>		<b>84.707.704.302.000</b>

- b. Kementerian Sosial RI mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp22.488.964.541.000,- (*dua puluh dua triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian:

No.	Unit Eselon 1	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
1	Sekretariat Jenderal	5.851.617.520.000
2	Inspektorat Jenderal	39.905.582.000
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	5.697.566.293.000
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	4.323.495.261.000
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.576.379.885.000
<b>JUMLAH</b>		<b>22.488.964.541.000</b>

3. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp187.250.365.000,- (*seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Pagu Indikatif TA 2027
1	Sekretariat Kementerian	147.014.829.000
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	6.290.139.000
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak	4.858.520.000
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	9.406.110.000

No.	Satuan Kerja	Pagu Indikatif TA 2027
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	11.680.877.000
6	Komisi Perlindungan anak Indonesia	7.999.890.000
<b>JUMLAH</b>		<b>187.250.365.000</b>

- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp392.496.950.000 (*tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian:

No.	Satuan Kerja	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
1	Sekretariat Kementerian	56.185.897.000
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	77.599.220.000
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak anak	43.481.843.000
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	54.194.047.000
5	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	153.392.372.000
6	Komisi Perlindungan anak Indonesia	7.643.571.000
<b>JUMLAH</b>		<b>392.496.950.000</b>

- c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mendapatkan pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2027 sebesar Rp118.000.000.000,- (*seratus delapan belas miliar rupiah*) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengusulkan tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2027 sebesar Rp 94.801.311.475,- (*sembilan puluh empat miliar delapan ratus satu juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
4. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umrah RI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian Haji dan Umrah RI mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.945.764.141.000,- (*satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Pagu Indikatif TA 2027
1	Dukungan Manajemen:	1.482.038.441.000
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	767.601.380.000
	b. Belanja Operasional Dasar Perkantoran	714.437.061.000
2	Inspektorat Jenderal	0
3	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0
4	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	0
5	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	0
6	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	0
No.	Program	Pagu Indikatif TA 2027
1	Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu serta Revitalisasi Asrama Haji melalui skema SBSN	463.725.700.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.945.764.141.000</b>

- b. Kementerian Haji dan Umrah RI mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.836.338.918.000,- (*satu triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*), dengan rincian:

No.	Satuan Kerja	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
1	Sekretariat Jenderal	543.381.738.000
2	Inspektorat Jenderal	27.966.824.000
3	Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.133.904.988.000
4	Direktorat Jenderal Pelayanan Haji	67.396.517.000
5	Direktorat Jenderal Pengembangan	39.954.288.000

No.	Satuan Kerja	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
	Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah	
6	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah	23.734.563.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.836.338.918.000</b>

5. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp500.110.194.000,- (*lima ratus miliar seratus sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Pagu Indikatif TA 2027
1	Sekretariat Utama	233.646.475.000
2	Inspektorat Utama	728.907.000
3	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	1.538.912.000
4	Deputi Bidang Pencegahan	1.600.000.000
5	Deputi Bidang Penanganan Darurat: a. Dana Siap Pakai (DSP)	250.000.000.000
	b. Program Penanganan Darurat	2.100.000.000
6	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2.540.000.000
7	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	700.000.000
8	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB	1.635.900.000
9	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	4.850.000.000
10	Pusat Pengendalian Operasi	770.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>500.110.194.000</b>

- b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp941.443.964.000,- (*sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*), dengan rincian:

No.	Unit Kerja	Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027
1	Sekretariat Utama	128.620.170.000
2	Inspektorat Utama	17.271.093.000
3	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	36.204.446.000
4	Deputi Bidang Pencegahan	88.021.395.000
5	Deputi Bidang Penanganan Darurat	17.958.321.000
6	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	42.200.776.000
7	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	504.233.737.000
8	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB	18.965.179.000
9	Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	79.750.807.000
10	Pusat Pengendalian Operasi	8.218.040.000
<b>JUMLAH</b>		<b>941.443.964.000</b>

6. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu indikatif anggaran tahun 2027 dan usulan tambahan anggaran tahun 2027 dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI mendapatkan pagu indikatif anggaran tahun 2027 sebesar Rp327.612.731.000,- (*tiga ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Eselon 1	Pagu Indikatif TA 2027
1	Sekretariat Utama	160.774.609.000
2	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	21.000.000.000
3	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	81.799.939.000
4	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	64.038.183.000
<b>JUMLAH</b>		<b>327.612.731.000</b>

- b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI mengusulkan tambahan anggaran pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.388.702.080.900,- (*satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah*), dengan rincian:

<b>No.</b>	<b>Unit Eselon 1</b>	<b>Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2027</b>
1	Sekretariat Utama	204.969.571.000
2	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal	95.892.026.900
3	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	1.029.440.483.000
4	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	58.400.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.388.702.080.900</b>

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.34 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**TTD**

**H. MARWAN DASOPANG, M.Si.**